



PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, perlu melakukan penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
- b. bahwa penetapan jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta;
 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218);
 6. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
 7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.02/A/OT/VIII/2003/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Konferensi Asia Afrika;
 8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri;
 9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Indeks Perwakilan pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Jakarta;
 10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 201);
 11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan

dan/atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai dalam suatu unit organisasi.
5. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Manajerial; dan
 - b. Jabatan Nonmanajerial.
- (3) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. Jabatan administrator; dan
 - d. Jabatan pengawas.

- (4) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jabatan fungsional; dan
 - b. Jabatan pelaksana.
- (5) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terdapat Jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan sesuai dengan nomenklatur Jabatan.
- (2) Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial di lingkungan Kementerian Luar Negeri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Nonmanajerial di lingkungan Kementerian Luar Negeri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Luar Negeri tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan jabatannya.
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian tunjangan kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki Jabatan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Maret 2026

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN MANAJERIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
SEKRETARIAT JENDERAL		
1.	SEKRETARIS JENDERAL	17
2.	Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan	15
3.	Kepala Bagian Dukungan Isu-Isu Tematik	13
4.	Kepala Bagian Dukungan Hubungan Antarnegara	13
5.	Kepala Bagian Dukungan Hubungan Media Pimpinan dan Juru Bicara	13
6.	Kepala Bagian Kesekretariatan dan Korespondensi Pimpinan	13
7.	Kepala Bagian Umum	13
8.	Kepala Subbagian Administrasi Keuangan	10
9.	Kepala Subbagian Keamanan dan Kerumahtanggaan Pimpinan	10
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
11.	Kepala Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan	15
12.	Kepala Bagian Administrasi Kementerian	13
13.	Kepala Subbagian Dukungan Substansi dan Tata Usaha Sekretaris Jenderal	10
14.	Kepala Subbagian Dukungan Substansi dan Tata Usaha Staf Ahli	10
15.	Kepala Subbagian Dukungan Substansi dan Tata Usaha Staf Khusus	10
16.	Kepala Bagian Administrasi Perwakilan	13
17.	Kepala Subbagian Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri	10
18.	Kepala Subbagian Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya	10
19.	Kepala Bagian Fasilitasi Koordinasi Kebijakan Luar Negeri	13
20.	Kepala Bagian Dukungan Layanan Pimpinan Perwakilan	13
21.	Kepala Subbagian Administrasi Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	10
22.	Kepala Subbagian Administrasi Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kawasan Amerika dan Eropa	10
23.	Kepala Subbagian Administrasi Konsul Kehormatan Republik Indonesia	10
24.	Kepala Bagian Persuratan dan Umum	13

25.	Kepala Subbagian Persuratan	10
26.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
27.	Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Jenderal	10
28.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	15
29.	Kepala Bagian Perencanaan Kinerja Kementerian dan Perwakilan	13
30.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah I	10
31.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah II	10
32.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah III	10
33.	Kepala Bagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Kementerian dan Perwakilan	13
34.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah I	10
35.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah II	10
36.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah III	10
37.	Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Kementerian dan Perwakilan	13
38.	Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah I	10
39.	Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah II	10
40.	Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah III	10
41.	Kepala Bagian Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan	13
42.	Kepala Subbagian Organisasi Kementerian	10
43.	Kepala Subbagian Organisasi Perwakilan I	10
44.	Kepala Subbagian Organisasi Perwakilan II	10
45.	Kepala Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan	13
46.	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Kementerian dan Perwakilan	10
47.	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan	10
48.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan	10
49.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
50.	Kepala Bagian Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan	13
51.	Kepala Subbagian Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara	10
52.	Kepala Subbagian Karier, Kompetensi, dan Kinerja	10
53.	Kepala Subbagian Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	10
54.	Kepala Bagian Administrasi Jabatan, Gelar, dan Pangkat	13
55.	Kepala Subbagian Kepangkatan dan Gelar Diplomatik I	10
56.	Kepala Subbagian Kepangkatan dan Gelar Diplomatik II	10
57.	Kepala Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan	10
58.	Kepala Bagian Pengisian Jabatan dan Mutasi	13
59.	Kepala Subbagian Mutasi Luar Negeri Wilayah Asia Pasifik dan Afrika	10

60.	Kepala Subbagian Mutasi Luar Negeri Wilayah Amerika dan Eropa	10
61.	Kepala Subbagian Pengisian Jabatan dan Mutasi Dalam Negeri	10
62.	Kepala Bagian Manajemen Pegawai Setempat	13
63.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Setempat	10
64.	Kepala Subbagian Perjanjian Kerja dan Kinerja Pegawai Setempat Wilayah Asia Pasifik dan Afrika	10
65.	Kepala Subbagian Perjanjian Kerja dan Kinerja Pegawai Setempat Wilayah Amerika dan Eropa	10
66.	Kepala Bagian Pembinaan, Kesejahteraan, dan Tata Usaha	13
67.	Kepala Subbagian Penghargaan, Pembinaan dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	10
68.	Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Pelindungan Aparatur Sipil Negara	10
69.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan	10
70.	Kepala Biro Keuangan	15
71.	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran	13
72.	Kepala Subbagian Penyiapan Anggaran	10
73.	Kepala Subbagian PNPB dan Penyelesaian Beban Pusat	10
74.	Kepala Subbagian Gaji dan Tunjangan	10
75.	Kepala Bagian Pengendalian Anggaran	13
76.	Kepala Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik	10
77.	Kepala Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika	10
78.	Kepala Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah	10
79.	Kepala Bagian Verifikasi Anggaran	13
80.	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik	10
81.	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika	10
82.	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah	10
83.	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	13
84.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah Asia dan Pasifik	10
85.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah Eropa dan Afrika	10
86.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah Amerika dan Timur Tengah	10
87.	Kepala Bagian Perbendaharaan	13
88.	Kepala Subbagian Pembinaan Ketatausahaan Keuangan	10
89.	Kepala Subbagian Administrasi Pejabat Perbendaharaan dan Kerugian Negara	10
90.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
91.	Kepala Biro Hukum	15
92.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-	13

	undangan	
93.	Kepala Bagian Layanan Hukum	13
94.	Kepala Bagian Kerja Sama	13
95.	Kepala Bagian Kearsipan, Pengelolaan Informasi Hukum, dan Tata Usaha	13
96.	Kepala Subbagian Kearsipan	10
97.	Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi Hukum	10
98.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
99.	Kepala Biro Umum dan Pengadaan	15
100.	Kepala Bagian Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana	13
101.	Kepala Subbagian Wilayah I	10
102.	Kepala Subbagian Wilayah II	10
103.	Kepala Subbagian Wilayah III	10
104.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	13
105.	Kepala Subbagian Pengadaan Barang/Jasa	10
106.	Kepala Subbagian Pembinaan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	10
107.	Kepala Subbagian Pengadaan Secara Elektronik	10
108.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	13
109.	Kepala Subbagian Wilayah I	10
110.	Kepala Subbagian Wilayah II	10
111.	Kepala Subbagian Wilayah III	10
112.	Kepala Bagian Pemeliharaan	13
113.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10
114.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Mesin	10
115.	Kepala Subbagian Urusan Dalam	10
116.	Kepala Bagian Pengamanan dan Kerumahtanggaan	13
117.	Kepala Subbagian Pengamanan Diplomatik	10
118.	Kepala Subbagian Keamanan dan Ketertiban	10
119.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA		
120.	DIREKTUR JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	17
121.	Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	15
122.	Kepala Bagian Perencanaan	13
123.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
124.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
125.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
126.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
127.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
128.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
129.	Kepala Bagian Keuangan	13
130.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
131.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
132.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
133.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan	10

	Barang Milik Negara	
134.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	10
135.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
136.	Kepala Bagian Fasilitasi Kerja Sama Antarlembaga dan Kertas Kerja	13
137.	Direktur Asia Tenggara	15
138.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
139.	Direktur Asia Timur	15
140.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
141.	Direktur Pasifik dan Oseania	15
142.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
143.	Direktur Asia Selatan dan Tengah	15
144.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
145.	Direktur Timur Tengah	15
146.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
147.	Direktur Afrika	15
148.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
149.	Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika	15
150.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA		
151.	DIREKTUR JENDERAL AMERIKA DAN EROPA	17
152.	Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	15
153.	Kepala Bagian Perencanaan	13
154.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
155.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
156.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
157.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
158.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
159.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
160.	Kepala Bagian Keuangan	13
161.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
162.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
163.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
164.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	10
165.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	10
166.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
167.	Kepala Bagian Fasilitasi Kerja Sama Antarlembaga dan Kertas Kerja	13
168.	Direktur Amerika I	15
169.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
170.	Direktur Amerika II	15
171.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10

172.	Direktur Eropa I	15
173.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
174.	Direktur Eropa II	15
175.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
176.	Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	15
177.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN		
178.	DIREKTUR JENDERAL KERJA SAMA ASEAN	17
179.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN	15
180.	Kepala Bagian Perencanaan	13
181.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
182.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
183.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
184.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
185.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
186.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
187.	Kepala Bagian Keuangan	13
188.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
189.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
190.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
191.	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	10
192.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, dan Kearsipan	10
193.	Kepala Subbagian Dukungan Pimpinan dan Publikasi	10
194.	Kepala Bagian Kerja Sama Antarpilar	13
195.	Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN	15
196.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
197.	Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN	15
198.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
199.	Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN	15
200.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
201.	Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN	15
202.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL		
203.	DIREKTUR JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL	17
204.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	15
205.	Kepala Bagian Perencanaan	13
206.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
207.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
208.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
209.	Kepala Bagian Umum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	13
210.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	10
211.	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kearsipan	10

212.	Kepala Subbagian Dukungan Pimpinan, Kertas Kerja, dan Publikasi	10
213.	Kepala Bagian Keuangan	13
214.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
215.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
216.	Kepala Bagian Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional	13
217.	Kepala Bagian Pencalonan Indonesia pada Organisasi Internasional	13
218.	Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional	15
219.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
220.	Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi	15
221.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
222.	Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup	15
223.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
224.	Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis	15
225.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL		
226.	DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	17
227.	Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	15
228.	Kepala Bagian Perencanaan	13
229.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
230.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
231.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
232.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
233.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
234.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
235.	Kepala Bagian Keuangan	13
236.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
237.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
238.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
239.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	10
240.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	10
241.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
242.	Kepala Bagian Tata Kelola Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional dan Kerja Sama Antarlembaga	13
243.	Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	15
244.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
245.	Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi	15
246.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
247.	Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya	15
248.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
249.	Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan	15

250.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN EKONOMI DAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN		
251.	DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN EKONOMI DAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN	17
252.	Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan	15
253.	Kepala Bagian Perencanaan	13
254.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
255.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
256.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
257.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
258.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
259.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
260.	Kepala Bagian Keuangan	13
261.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
262.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
263.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
264.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	10
265.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	10
266.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
267.	Kepala Bagian Fasilitas Kerja Sama Antarlembaga dan Kertas Kerja	13
268.	Direktur Perdagangan Internasional	15
269.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
270.	Direktur Investasi dan Ekonomi Kreatif	15
271.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
272.	Direktur Sumber Daya dan Industrialisasi	15
273.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
274.	Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional	15
275.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK		
276.	DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	17
277.	Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	15
278.	Kepala Bagian Perencanaan	13
279.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
280.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
281.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
282.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
283.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
284.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
285.	Kepala Bagian Keuangan	13
286.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10

287.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
288.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
289.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	10
290.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	10
291.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
292.	Kepala Bagian Fasilitas Kerja Sama Antarlembaga dan Kertas Kerja	13
293.	Kepala Subbagian Kerja Sama Antarlembaga	10
294.	Kepala Subbagian Kertas Kerja dan Laporan	10
295.	Kepala Subbagian Dukungan Pimpinan	10
296.	Direktur Informasi dan Media	15
297.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
298.	Direktur Diplomasi Publik	15
299.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
300.	Direktur Urusan Diaspora	15
301.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
302.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum Konferensi Asia Afrika	13
303.	Kepala Seksi Publikasi dan Promosi Nilai-nilai Konferensi Asia Afrika	10
304.	Kepala Seksi Pelestarian dan Dokumentasi Diplomasi Publik	10
305.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER		
306.	DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	17
307.	Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	15
308.	Kepala Bagian Perencanaan	13
309.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
310.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
311.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
312.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
313.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
314.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
315.	Kepala Bagian Keuangan	13
316.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
317.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
318.	Kepala Bagian Umum, Dokumentasi, dan Publikasi	13
319.	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	10
320.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	10
321.	Kepala Subbagian Persuratan, Dokumentasi, Publikasi, dan Kearsipan	10
322.	Kepala Bagian Dukungan Pimpinan, Kertas Kerja, Korespondensi Diplomasi, dan Analisis Pelayanan Publik	13

323.	Kepala Subbagian Dukungan Pimpinan dan Kertas Kerja	10
324.	Kepala Subbagian Korespondensi Diplomatik	10
325.	Kepala Subbagian Analisis Data dan Pelayanan Publik	10
326.	Direktur Protokol	15
327.	Kepala Subdirektorat Kunjungan Luar Negeri	13
328.	Kepala Subdirektorat Tamu Negara Asing	13
329.	Kepala Subdirektorat Dukungan Keprotokolan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri	13
330.	Kepala Subdirektorat Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan	13
331.	Kepala Subdirektorat Pertemuan Internasional dan Kerja Sama Antarlembaga	13
332.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
333.	Direktur Konsuler	15
334.	Kepala Subdirektorat Paspor Diplomatik dan Dinas	13
335.	Kepala Subdirektorat Visa Diplomatik dan Dinas	13
336.	Kepala Subdirektorat Perizinan Tinggal Diplomatik dan Dinas serta Perizinan Organisasi Kemasyarakatan Asing	13
337.	Kepala Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Pelayaran, dan Legalisasi	13
338.	Kepala Subdirektorat Jasa Kekonsuleran	13
339.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
340.	Direktur Fasilitas Diplomatik	15
341.	Kepala Subdirektorat Kendaraan Bermotor	13
342.	Kepala Subdirektorat Perpajakan	13
343.	Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Fasilitas Kunjungan Daerah	13
344.	Kepala Subdirektorat Perizinan dan Bangunan	13
345.	Kepala Subdirektorat Barang Diplomatik dan Pas Bandara	13
346.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
347.	Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia	15
348.	Kepala Subdirektorat Kawasan Asia Tenggara	13
349.	Kepala Subdirektorat Kawasan Timur Tengah	13
350.	Kepala Subdirektorat Kawasan Lain di Luar Asia Tenggara dan Timur Tengah	13
351.	Kepala Subdirektorat Tata Kelola dan Diplomasi Pelindungan	13
352.	Kepala Subdirektorat Sistem dan Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik	13
353.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
INSPEKTORAT JENDERAL		
354.	INSPEKTUR JENDERAL	17
355.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
356.	Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian	13
357.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	10
358.	Kepala Subbagian Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko	10

359.	Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
360.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	10
361.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	10
362.	Kepala Bagian Keuangan, Perlengkapan, dan Tata Usaha	13
363.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	10
364.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
365.	Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	13
366.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan dan Kepatuhan Pegawai	10
367.	Kepala Subbagian Pengelolaan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi	10
368.	Inspektur Wilayah I	15
369.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
370.	Inspektur Wilayah II	15
371.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
372.	Inspektur Wilayah III	15
373.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
374.	Inspektur Wilayah IV	15
375.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI		
376.	KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	17
377.	Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	15
378.	Kepala Bagian Perencanaan	13
379.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja	10
380.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	10
381.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi	10
382.	Kepala Bagian Umum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	13
383.	Kepala Subbagian Perlengkapan	10
384.	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan	10
385.	Kepala Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	10
386.	Kepala Bagian Keuangan	13
387.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran	10
388.	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	10
389.	Kepala Bagian Ketatausahaan, Publikasi, dan Kerja Sama	13
390.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
391.	Kepala Subbagian Publikasi dan Diseminasi	10
392.	Kepala Subbagian Kerja Sama Antarlembaga	10
393.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	15
394.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
395.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa	15
396.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
397.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral	15
398.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10

399.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data	15
400.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
PUSAT		
401.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	15
402.	Kepala Bidang Analisis, Pengembangan, Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan dan Layanan Perpustakaan	13
403.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kekanseleraian	13
404.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Informasi Diplomatik	13
405.	Kepala Bidang Kerja Sama dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan	13
406.	Kepala Bagian Tata Usaha	13
407.	Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja dan Keuangan	10
408.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum	10
409.	Direktur Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU)	14
410.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12
411.	Kepala Seksi Penguasaan Pengetahuan dan Keahlian Dasar Diplomasi	10
412.	Kepala Seksi Penguasaan Keterampilan Dasar Diplomasi	10
413.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
414.	Direktur Unit Pelaksana Teknis Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU)	14
415.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12
416.	Kepala Seksi Peningkatan Pengetahuan dan Keahlian Diplomasi	10
417.	Kepala Seksi Peningkatan Keterampilan Diplomasi	10
418.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
419.	Direktur Unit Pelaksana Teknis Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU)	14
420.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12
421.	Kepala Seksi Kepemimpinan Diplomasi	10
422.	Kepala Seksi Manajemen Diplomasi	10
423.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
424.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	15
425.	Kepala Bidang Data dan Tata Kelola Teknologi Informasi	13
426.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pusat Data	13
427.	Kepala Bidang Sistem Informasi	13
428.	Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Siber	13
429.	Kepala Bagian Tata Usaha	13
430.	Kepala Subbagian Kinerja, Keuangan, dan Organisasi	10
431.	Kepala Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia	10
432.	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	15
433.	Kepala Bidang Standardisasi dan Kerja Sama Pembinaan Jabatan Fungsional	13

434.	Kepala Bidang Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	13
435.	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitas	13
436.	Kepala Bagian Tata Usaha	13
437.	Kepala Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia	10
438.	Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Evaluasi	10

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGIONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN NONMANAJERIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

I. Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Diplomat Ahli Utama	14
2.	Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia (Diplomat Ahli Madya yang diberikan tugas tambahan sebagai Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN)	14
3.	Diplomat Ahli Madya	12
4.	Diplomat Ahli Muda	10
5.	Diplomat Ahli Pertama	8
6.	Penata Kanselera Ahli Madya	11
7.	Penata Kanselera Ahli Muda	9
8.	Penata Kanselera Ahli Pertama	8
9.	Pranata Informasi Diplomatik Ahli Madya	11
10.	Pranata Informasi Diplomatik Ahli Muda	9
11.	Pranata Informasi Diplomatik Ahli Pertama	8
12.	Arsiparis Ahli Madya	11
13.	Arsiparis Ahli Muda	9
14.	Arsiparis Ahli Pertama	8
15.	Arsiparis Penyelia	8
16.	Arsiparis Mahir	7
17.	Arsiparis Terampil	6
18.	Auditor Ahli Madya	12
19.	Auditor Ahli Muda	10
20.	Auditor Penyelia	9
21.	Auditor Ahli Pertama	8
22.	Auditor Mahir	7
23.	Sandiman Ahli Madya	12
24.	Sandiman Ahli Muda	10
25.	Sandiman Penyelia	9
26.	Sandiman Mahir	8
27.	Widyaiswara Ahli Madya	12
28.	Widyaiswara Ahli Muda	10
29.	Widyaiswara Ahli Pertama	8
30.	Pamong Budaya Ahli Madya	11
31.	Pamong Budaya Ahli Muda	9
32.	Pamong Budaya Ahli Pertama	8
33.	Pamong Budaya Penyelia	8

34.	Pamong Budaya Mahir	7
35.	Pamong Budaya Terampil	6
36.	Pustakawan Ahli Madya	11
37.	Pustakawan Ahli Muda	9
38.	Pustakawan Ahli Pertama	8
39.	Pustakawan Penyelia	8
40.	Pustakawan Mahir	7
41.	Pustakawan Terampil	6
42.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
43.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
44.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
45.	Dokter Ahli Madya	12
46.	Dokter Ahli Muda	10
47.	Dokter Ahli Pertama	9
48.	Dokter Gigi Ahli Madya	12
49.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
50.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
51.	Perawat Ahli Muda	10
52.	Perawat Ahli Pertama	8
53.	Perawat Penyelia	8
54.	Perawat Mahir	7
55.	Perawat Terampil	6
56.	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8
57.	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
58.	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
59.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
60.	Apoteker Ahli Muda	10
61.	Apoteker Ahli Pertama	8
62.	Asisten Apoteker Terampil	6
63.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6
64.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
65.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
66.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
67.	Perencana Ahli Madya	12
68.	Perencana Ahli Muda	10
69.	Perencana Ahli Pertama	8
70.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
71.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
72.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
73.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
74.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
75.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
76.	Pranata Komputer Penyelia	8
77.	Pranata Komputer Mahir	7
78.	Pranata Komputer Terampil	6
79.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
80.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
81.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
82.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
83.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
84.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9

85.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
86.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
87.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
88.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
89.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
90.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
91.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
92.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
93.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
94.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	10
95.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	8

II. Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
2.	Penata Layanan Operasional	7
3.	Pengolah Data dan Informasi	6
4.	Dokumentalis Hukum	6
5.	Pengelola Keprotokolan	6
6.	Pengelola Layanan Operasional	6
7.	Operator Layanan Operasional	5

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGIONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	16
2.	Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi	16
3.	Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia	16
4.	Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga	16
5.	Staf Ahli Bidang Manajemen	16
6.	Staf Khusus	16

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGIONO